

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : III
Rapat ke- : 11
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 25 Januari 2022
Waktu : 11.20 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas:
1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021;
2. *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA. 2022; dan
3. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022.
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh H. Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG), G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra), Rusdi Masse Mappasessu (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem) dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 45 Anggota dari 53 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal sekaligus Plt. Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM);
4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal);
5. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan);

6. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem);
7. Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum. (Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan);
8. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun);
9. Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim);
10. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);
11. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
12. Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan);
13. Ir. Ary Sudijanto, M.Sc. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
14. Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si. (Kuasa Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove);
15. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum Perhutani);
16. Oman Suherman (Direktur Utama PT Inhutani I);
17. Ir. Bakhrizal Bakri, M.M. (Direktur PT Inhutani II);
18. Hezlysyah Siregar (Direktur PT Inhutani III);
19. Sri Widodo (Direktur PT Inhutani IV); dan
20. Dicky Yuana Rady (Direktur Utama PT Inhutani V).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA. 2022, dan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022, dibuka pukul 11.20 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran tahun 2021 serta rencana program, kegiatan, dan anggaran tahun 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk mengevaluasi dan menyusun ulang rencana program, kegiatan, dan anggaran tahun 2022 dengan lebih cermat, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup serta mengelola dan melestarikan hutan, disamping memberikan dukungan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, yang akan dibahas lebih detil bersama dengan Eselon I pada rapat berikutnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sebesar Rp281.963.941.000,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar program dan kegiatan yang terkena Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) adalah kegiatan yang paling sedikit/tidak berdampak langsung terhadap upaya peningkatan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
3. Komisi IV DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepakat untuk melaksanakan Rapat Kerja pada minggu kedua bulan Februari 2022 untuk membahas perusahaan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan yang tanpa prosedur pelepasan kawasan serta perusahaan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang belum melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sebagaimana butir 5 kesimpulan RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove tanggal 29 November 2021.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data terbaru nama-nama perusahaan yang belum membayar kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk dibahas dalam Rapat Kerja selanjutnya.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera merealisasikan program/kegiatan berbasis masyarakat serta bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, mulai awal tahun 2022.

6. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencari alternatif pelaksanaan program/kegiatan yang sekaligus memberikan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti butir 4 kesimpulan RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove tanggal 29 November 2021 terkait penganggaran minimal sebesar 40% dari PNBP di Bidang Kehutanan sebagai sumber pendanaan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjaga kelestarian hutan dan kualitas lingkungan hidup di lokasi calon ibukota negara.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.20 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,

Ttd.

Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151